



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA DINAS
Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730116 199311 1 001



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
TAHUN 2025

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kedudukan/ Domisili	Berisi tentang kedudukan/domisili kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025		v	Aktif	https://dklh.baliprov.go.id/
2	Struktur Organisasi	Berisi tentang struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025		v	Aktif	https://dklh.baliprov.go.id/struktur-organisasi/
3	Tugas Pokok dan Instansi	Berisi tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025		v	Aktif	https://dklh.baliprov.go.id/tugas-dan-fungsi/
4	SOP Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya	Berisi tentang tahapan proses Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
5	SOP Pengawasan dan Persediaan Barang Persediaan	Berisi tentang proses Pengawasan dan Persediaan Barang Persediaan	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
6	SOP Pengelolaan Surat Kantor Virtual	Berisi tentang proses Pengelolaan surat kantor virtual	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
7	SOP Usul Penghapusan Barang Milik Daerah	Berisi tentang Usul Penghapusan Barang Milik Daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
8	SOP Pencatatan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Berisi tentang proses Pencatatan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
9	SOP Belanja Gaji Non ASN	Berisi tentang proses Belanja Gaji Non ASN	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
10	SOP Pelayanan Tamu dari Luar Daerah	Berisi tentang proses Pelayanan Tamu dari Luar Daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing
11	SOP Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Berisi tentang proses Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1IVs-gebhT23rHTy_ha5wguUICxHMB2Vr/view?usp=sharing

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	Berisi tentang proses Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1sz2txhbFryXcTi562SAKsSsqtlezF6Cv/view?usp=drive_link
13	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Berisi tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1ZgiqO--rOZzR35M89jCUWOH70G1P49O3/view?usp=drive_link
14	SOP Penyusunan/Pergeseran Anggaran	Berisi tentang Penyusunan/Pergeseran Anggaran	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1UNWzn_qPsc4P4qbikaj1sfNjrkh_Ep/view?usp=drive_link
15	SOP Penyusunan Rencana Kerja	Berisi tentang Penyusunan Rencana Kerja	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1jgdpd3injA1FcLNou-lUWWHNl0aLumaM/view?usp=drive_link
16	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Berisi tentang Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1p5opA21ayMFh0wuiRupQl6EiXQKlRO-X/view?usp=drive_link
17	SOP Penyusunan Renstra	Berisi tentang Penyusunan Renstra	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1M8WlaQxpDeJGSN4Gqy8FtMR2GSUDan52/view?usp=drive_link
18	SOP Penyusunan SAKIP	Berisi tentang Penyusunan SAKIP	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1ZJAD_PHXviV8RjwaoMdh8v2M5konycsH/view?usp=drive_link
19	SOP Bendahara Penerima	Berisi tentang Bendahara Penerima	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1RUKwb537bW9o2P_Q3sagNVyz3TzglrR4/view?usp=drive_link
20	SOP Bendahara Pengeluaran	Berisi tentang Bendahara Pengeluaran	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1eWF7gCu7hCzXVNeVEVUqXjuR3gOr9RP2/view?usp=drive_link
21	SOP Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang	Berisi tentang Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1QeWZJHfnhc4UGjifahMlylqfndgXgdoB/view?usp=drive_link
22	SOP Pembuatan Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuatan SPJ Fungsional	Berisi tentang Pembuatan Dokumen Pengeluaran Uang dan Pembuatan SPJ Fungsional	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1uP-rIbw6V1qFwxmUEdK4jv6xWloe8-D7/view?usp=drive_link
23	SOP Penata Laporan Keuangan	Berisi tentang Penata Laporan Keuangan	Sekretariat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1NOKkjX09i1zajLnlf2IHbp-tkLoyWIQc/view?usp=drive_link

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	SOP Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Bali	Berisi tentang Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
25	SOP Kegiatan Movev Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Bali	Berisi tentang Kegiatan Movev Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
26	SOP Pembinaan dan Movev Industri di Provinsi Bali	Berisi tentang Pembinaan dan Movev Industri di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
27	SOP Penanganan Kasus Kehutanan	Berisi tentang Penanganan Kasus Kehutanan	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
28	SOP Pengendalian Illegal Logging, Perambahan dan Kebakaran Hutan	Berisi tentang Proses Pengendalian Illegal Logging, Perambahan dan Kebakaran Hutan	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
29	SOP Kegiatan Pendampingan dalam Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat yang Berbatasan Dengan Kawasan Hutan	Berisi tentang proses Kegiatan Pendampingan dalam Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat yang Berbatasan Dengan Kawasan Hutan	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
30	SOP Rekomendasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi	Berisi tentang Rekomendasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KKQj3YMnBWbZMJ4Pv6rxZMf-hnaGjl8a/view?usp=sharing
31	SOP Kegiatan Bantuan Bibit kepada Masyarakat	Berisi Tentang Kegiatan Bantuan Bibit kepada Masyarakat	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1ukomTmtDSALitA-Ky6a4l4e3bZ50tTgV/view?usp=drive_link
32	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUPS	Berisi tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KUPS	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1kVluRXq9RWjBB-xpma7Vhx4F37gRcq0o/view?usp=drive_link
33	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial	Berisi tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1iqvsUGNQSALB0T7-5fNufRwuh0P4H6tC/view?usp=drive_link
34	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SWP-DAS	Berisi tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SWP-DAS	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1vqUdWf8mF4wZXigWlnAllXGFWH3wjv0U/view?usp=drive_link
35	SOP Kegiatan Penyuluhan Kelompok Tani Hutan	Berisi tentang proses Kegiatan Penyuluhan Kelompok Tani Hutan	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1ddCPODaEKqX6CljgmMP_yTznfap6teld/view?usp=drive_link

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	SOP Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berisi tentang Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1GRNuR_coNlziaom4PlwwC_XhOXiOTyXtt/view?usp=drive_link
37	SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KTH	Berisi tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KTH	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1fUIXjw381Ohq9m2SZCPG_aJY0xfzEm5g/view?usp=drive_link
38	SOP Kegiatan Pengadaan Bibit	Berisi tentang Kegiatan Pengadaan Bibit	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/10Pwd-QfOYu6TIYXjUl7bP0EmvS8VZ3AN/view?usp=drive_link
39	SOP Kegiatan Peningkatan Kelas KTH	Berisi tentang Kegiatan Peningkatan Kelas KTH	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1_3sTVE7k96w1poCiWDyG9odGSKp0_O_F/view?usp=drive_link
40	SOP Penegakan Hukum Lingkungan	Berisi tentang proses Penegakan Hukum Lingkungan	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1llr-zx5okk9W5XxdownwrfWhy5EyluaX8Q/view?usp=drive_link
41	SOP Pengaduan Kasus Lingkungan	Berisi tentang Pengaduan Kasus Lingkungan	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1RhaNysFcnMPQyrSvq1ilHbMY1UJ0AtRq/view?usp=drive_link
42	SOP Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Berisi tentang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1rP_tBRp3teztvQ1mPtcsYmxzuExEbyr/view?usp=drive_link
43	SOP Penyusunan Dokumen KLHS	Berisi tentang Penyusunan Dokumen KLHS	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1KQq-6TJ2KEvIPA_d3pTQ5AQYDAYG_FiX/view?usp=drive_link
44	SOP Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Berisi tentang proses Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/10Xs923UQxcaY3vX0_Pgi7COW-S8WwRUm/view?usp=drive_link
45	SOP Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Berisi tentang Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1PtkeXKbXuphfalry9jLbOLeBoCkHd5/view?usp=drive_link
46	SOP Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Berisi tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1kFCspYabs8J6kpUumelcMbBRpv1qzB3/view?usp=drive_link
47	SOP Pemantauan Kualitas Udara	Berisi tentang proses Pemantauan Kualitas Udara	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1khe8W6cgmRfMiq-EzIXehiWRpgp82CHn/view?usp=drive_link

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	SOP Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Berisi tentang proses Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1LEdksW4sY2iw85tOixZzuW3hD50h1VU/view?usp=drive_link
49	SOP Pemantauan Kualitas Air	Berisi tentang Pemantauan Kualitas Air	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2025	v	v	aktif	https://drive.google.com/file/d/1rTgdxVyFR-qLcH6vhhDzzmYdOc79vGDM/view?usp=drive_link
50	Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/luas-kawasan-hutan-berdasarkan-fungsi-dalam-satuan-ha-2020?year=2020
51	Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya pada masing - masing Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan	Berisi tentang Data Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya pada masing - masing Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/luas-kawasan-hutan-berdasarkan-fungsi-pada-masing-masing-kelompok-hutan-2020?year=2023
52	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-iklh?year=2023
53	Data Timbulan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Timbulan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zplmAHXLMaDlLnTrO2nM_ZeXdZx-0JYl/edit?usp=sharing&oid=109162177719395596641&rt=pof=true&sd=true
54	Data Pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zplmAHXLMaDlLnTrO2nM_ZeXdZx-0JYl/edit?usp=sharing&oid=109162177719395596641&rt=pof=true&sd=true
55	Data Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zplmAHXLMaDlLnTrO2nM_ZeXdZx-0JYl/edit?usp=sharing&oid=109162177719395596641&rt=pof=true&sd=true
56	Data Pengelolaan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Pengelolaan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zplmAHXLMaDlLnTrO2nM_ZeXdZx-0JYl/edit?usp=sharing&oid=109162177719395596641&rt=pof=true&sd=true
57	Data TPST/TPS3R per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Pengelolaan Sampah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan PPKLH	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/data-tps3rtpst-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2023
58	Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Berisi tentang Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rehabilitasi-hutan-dan-lahan-kritis?year=2023
59	Data Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-air-ika?year=2023

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Data Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-udara-iku?year=2023
61	Data Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-tutupan-lahan-dan-ekosistem-gambut-iki?year=2023
62	Data Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-air-ika?year=2023
63	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-ikh-di-kabupaten?year=2023
64	Data Jumlah Penanganan Kasus Illegal Logging di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Jumlah Penanganan Kasus Illegal Logging di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-penanganan-kasus-illegal-logging?year=2022
65	Data Jumlah Penanganan Kasus Perambahan di Provinsi Bali	Berisi tentang Data Jumlah Penanganan Kasus Perambahan di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024		v	aktif	https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-penanganan-kasus-perambahan?year=2023
66	Rekomendasi SKKL Lingkungan	Berisi tentang Rincian Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Nama Perusahaan Pemohon, No dan Tanggal permohonan dari DPMPSTP, No dan tanggal pembahasan penyempurnaan, perbaikan, rekomendasi, No dan tanggal izin lingkungan dari DPMPSTP	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024	v	v	Aktif	
67	PROPER	Berisi tentang Jumlah industri yang taat terhadap kinerja pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan dokumen lingkungan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	2024	v	v	Aktif	

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	3	4	5	6	7
1	Memo Internal dan Disposisi Pimpinan yang Memuat Arahan, Pertimbangan, atau Pendapat dalam Proses Pengambilan Keputusan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
6	Sistem Keamanan Elektronik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
7	Bandwidth Management	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
8	Peta Lokasi penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	3	4	5	6	7
9	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
10	Rencana MoU (kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
11	MoU/PKS yang masih dalam proses penyusunan	Pasal 17 Huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang jasa	Mempengaruhi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa	Melindungi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa
12	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
13	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih dalam proses lelang	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Sampai diaudited oleh tim audit	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
15	Alat bukti kasus	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UUD Tahun 1945 Pasal 28 D UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	3	4	5	6	7
16	Opini hukum	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
17	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 53 Tahun 2010 UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
18	Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
19	Data Elektronik Pegawai/Biodata ASN dan Non ASN yang bersifat Pribadi (Database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 h	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
20	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
21	Identitas Pegawai yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 sampai dengan 28 Huruf h	Dibuka apabila: Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri Permintaan institusi/ lembaga berwenang	Mengungkap data pribadi pegawai Melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
22	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Mengamankan Proses Penegakan Hukum
23	Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
24	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25	Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	3	4	5	6	7
26	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Menghambat pengambilan kebijakan Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan serta menghindari terjadinya KKN. Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai
27	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan I PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
28	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatihan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs.	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
29	Data individu sensus dan survei	UU No. 14 Tahun 2008	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
30	Identitas pemohon informasi	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
31	Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan Privasi Mengenai Penyakit Pasien	Melindungi Privasi mengenai Penyakit Pasien
32	Nomor Rekening Bank Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data base)
33	Buku Rekening Tabungan Pegawai, dan Saldo Rekening Bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan penggunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen serta Data Pribadi
34	Data User Name Email dan Password Aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) ASN dan Non ASN	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	3	4	5	6	7
35	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat
36	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
37	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi/merugikan institusi
38	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan I Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi
39	Informasi hasil rapat atau notulensi yang bersifat rapat tertutup	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan